

BAB II

SEJARAH SERTA DINAMIKA POLITIK DAN EKONOMI MYANMAR DI BAWAH REZIM MILITER

A. Sejarah Berdirinya Rezim Militer di Myanmar

Setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar menerapkan sistem demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Myanmar dipimpin oleh U Nu sebagai Perdana Menteri. Saat itu, militer memiliki peran penting dalam proses memperoleh kemerdekaan. Militer mengklaim dirinya sebagai kekuatan utama yang membuat Myanmar bersatu dan berhasil mencegah terjadinya terdisintegrasi.

Ketika rezim sipil U Nu berkuasa, Pemerintahannya gagal untuk menjaga kesatuan Myanmar yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah domestik. Myanmar mengalami berbagai permasalahan dalam negeri, mulai dari isu etnis, pemberontakan, korupsi, *mismanagement*, dan pemberontakan etnis yang melibatkan perebutan senjata. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam negeri tersebut, U Nu menunjuk pihak militer untuk memberntuk *caretaker Government* sejak tahun 1958-1960.

Pemberontak pertama yang muncul adalah pihak komunis. Kemudian, pemberontakan ini diikuti oleh veteran-veteran Aung San yang anti-Inggris dan pro-Jepang. Untuk pemberontak etnis, dilakukan oleh orang-orang *tribal* yang disebut sebagai Karen yang tinggal di bagian selatan Myanmar.³⁴ Walaupun terjadi pemberontakan etnis, masih ada pihak minoritas yang bersedia untuk bergabung dalam kesatuan Myanmar dan

³⁴ Britannica. t.thn. *Karen*. Diakses April 6, 2018.
<https://www.britannica.com/topic/Karen>

berpihak pada pemerintah. Suku-suku yang berada di pihak pemerintah antara lain, Chin, Kachin, dan Shan.³⁵

Di bawah pimpinan Jenderal Ne Win, 'pemerintahan' ini berfokus dalam membangun *state capacity*. Ne Win dan pemerintahannya berhasil menurunkan angka korupsi, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan berhasil melakukan kesepakatan dengan *pocket armies*.³⁶

Pada tahun 1960 Myanmar mengadakan pemilihan umum dan militer ditunjuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum berlangsung. Hasil akhir pemilihan umum ini dimenangkan oleh *Union Party*, partai yang diusung oleh U Nu, dan membuat dia kembali menjadi Perdana Menteri Myanmar.³⁷ Namun, pemerintahan sipil di bawah U Nu ini kembali belum berhasil menyelesaikan ancaman-ancaman yang membuat Myanmar rawan terdisintegrasi.

Kegagalan pemerintahan sipil ini menyebabkan terjadinya *military coup* pada 2 Maret 1962. Alasan utama dari *military coup* ini adalah gabungan dari pertikaian politik, *policy gridlock*, pemberontakan yang terjadi berkali-kali, dan penurunan ekonomi. *Military coup* ini membuat Myanmar berubah menjadi negara sosialis satu

³⁵ Britannica. t.thn. *Myanmar*. Diakses April 6, 2018. <https://www.britannica.com/place/Myanmar/Since-independence#ref509634>

³⁶ Devi, Konsam Shakila. Op.Cit hlm. 46

³⁷ Apriyanti, Devi. 2017. "Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013)." *neliti.com*. 10 November. <https://media.neliti.com/media/publications/31474-ID-reformasi-politik-dan-ekonomi-di-myanmar-pada-masa-pemerintahan-presiden-u-thein.pd> hlm. 1

partai dengan *Burma Socialist Programme Party* (BSPP) sebagai partai utama.³⁸

Jenderal Ne Win kemudian mendirikan pemerintahan *xenophobic* dengan memprioritaskan ekonomi sosialis.³⁹ Pemerintahan Ne Win kemudian memutuskan kontrol pedagang India, Tiongkok, dan Pakistan terhadap perekonomian negara dan memulai perekonomian dengan program percepatan industrialisasi yang tidak berhasil.⁴⁰

Setelah melakukan kudeta, Ne Win mendirikan *Revolutionary Council* (RC) dan memosisikan dirinya sebagai *chairman*. *Revolutionary Council* kemudian mengambil langkah untuk mengeliminasi semua rival yang ada dan yang berpotensi menjadi rivalnya. Perdana Menteri U Nu kemudian ditahan bersama dengan pemimpin-pemimpin partai politik dan gerakan separatis. RC kemudian menghilangkan parlemen, dan mendirikan pengadilan baru.⁴¹ Sejak penahanan tersebut dilakukan, pemerintahan junta militer resmi berjalan.

³⁸ Devi, Konsam Shakila. Op.cit

³⁹ GlobalSecurity.org. (t.thn.). *Military Coups in Burma*. Dipetik April 6, 2018, dari GlobalSecurity: <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/myanmar1.htm>

⁴⁰ Britannica. (t.thn.). *U Ne Win*. Dipetik April 6, 2018, dari <https://www.britannica.com/biography/U-Ne-Win>

⁴¹ Holmes, Robert A. 1967. "Burmese Domestic Policy: The Politics of Burmanization." *Asian Survey* hlm. 189

B. Dinamika Politik Myanmar di Bawah Rezim Militer

1. Politik Dalam Negeri Myanmar

a. *Politik Myanmar di bawah Revolutionary Council (RC) dan Burmese Socialist Program Party (BSPP) tahun 1962-1988*

Di bawah *Revolutionary Council*, kondisi politik Myanmar diwarnai dengan upaya nasionalisasi dan pemutusan hubungan serta pengaruh dari Barat dan luar Myanmar. Pada tanggal 30 April 1962, *Revolutionary Council* mengumumkan sebuah ideologi nasional dan *action plan* baru yang diberi nama "*The Burmese Way to Socialism*". Proklamasi ini adalah puncak dari usaha militer untuk memformulasikan sebuah ideologi yang dapat mengonsolidasi dan memimpin masyarakat dan mencegah perpecahan dalam struktur partai.⁴² Ideologi nasional tersebut bertujuan untuk merekonstruksi kehidupan sosial dan ekonomi dari masyarakat Myanmar setelah *Revolutionary Council* berhasil menyelamatkan negara dari disintergrasi.⁴³ Pada 4 Juli 1962 RC mendirikan *Burmese Socialist Programme Party* (BSPP)

Kecenderungan dari *Revolutionary Council* adalah untuk mendorong sebuah '*Burmese way of life*' yang menyarankan perubahan dari cara-cara Barat (*Western ways*). Pemimpin-pemimpin utama dari *Revolutionary Council* mengidentifikasi diri mereka sebagai *anti-western nationalist* dengan sosialis sebagai tujuan politiknya. Dari sudut pandang *Burmese*,

⁴² Mehden, Fred R. von der. 1963. "'The Burmese Way to Socialism'." *Asian Survey* Vol. 3 No. 3 hlm. 129

⁴³ Revolutionary Council. 1962. "The Constitution of the Burma Socialist Programme Party." Constitution Document

sosialisme menunjukkan adanya hal-hal baik dalam kehidupan, sedangkan kapitalisme selalu diasosiasikan dengan kolonialisme dan menunjukkan banyak keburukan.⁴⁴

Modernisasi ekonomi Myanmar ketika masa kolonialisme menghasilkan sebuah *dual society*. Di satu sisi, sektor modern berada di bawah kepemilikan asing. Sedangkan sektor tradisional masih berada di tangan penduduk lokal. Namun, kontrol penduduk lokal terhadap sektor tradisional perlahan-lahan hilang disebabkan oleh investasi asing, khususnya dari orang-orang India.

Dominasi asing mulai mengalami penyebaran yang cukup besar. Orang-orang Eropa mengontrol perdagangan internasional dan industri, sedangkan imigran dari *subcontinent* menguasai *credit*, *retail trade*, dan industri menengah. Kelompok asal Tiongkok juga banyak mengelola *urban retail business*.⁴⁵

Bentuk dari kebijakan yang anti-Barat ditunjukkan salah satunya dengan pemutusan kerja sektor jasa dari dua organisasi filantropik Amerika Serikat, The Ford dan Asia Foundations. Pemerintah mengumumkan bahwa semua bantuan internasional akan bersifat “*government to government*”.

Pemutusan hubungan dengan Barat juga terjadi di bidang pendidikan. Myanmar yang sebelumnya memiliki kerja sama dengan Inggris dan Amerika dalam bentuk pertukaran pelajar,

⁴⁴ Badgley, John H. 1962. "The Nexus of Socialism and Two Political Traditions." *Asian Survey* hlm. 91

⁴⁵ Steinberg, David I. 1997. *Myanmar: The Anomalies of Politics and Economics*. Working Paper, The Asia Foundation hlm. 7

memutus semua kerja samanya. Selain itu, pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Inggris yang awalnya dimulai sejak taman kanak-kanak baru diperkenalkan pada sekolah menengah pertama dan atas.

Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah, membuat masyarakat Myanmar kesulitan untuk memperoleh visa guna melakukan perjalanan dan belajar di negara-negara Barat. Sebaliknya, pelajar, ilmuwan, dan teknisi Myanmar dikirim ke Uni Soviet dan Eropa Timur untuk mendapat pelatihan. Pada saat itu, orang-orang Rusia bekerja di *Burmese Technical Institute* yang didirikan atas bantuan dari Uni Soviet.

Pemerintah Myanmar juga melakukan pemaksaan untuk mengekang propaganda dan informasi aktifitas diplomatik asing. Pada saat itu dilakukan pelarangan bagi seluruh kedutaan besar untuk mempertontonkan film-film yang dianggap mengandung propaganda dan melarang pendistribusian publikasi berbahasa asing yang dicetak di luar Myanmar. Peraturan pada saat itu meminta kedutaan-kedutaan asing dan konsulat untuk mengirimkan semua berita ke Burma Foreign Office sebelum didistribusikan ke media.

Revolutionary Council kemudian mendirikan News Agency of Burma yang didirikan untuk menjaga ketidakterlibatan dengan blok-blok besar dalam kaitannya dengan pendistribusian berita internasional di Myanmar. Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa cara sebuah berita dilaporkan tidak bersinggungan dengan prinsip dan kebiasaan dari kebijakan luar negeri Myanmar, yaitu, *neutrality*. Agensi ini kemudian menggantikan semua kantor-kantor berita asing dalam pendistribusian berita.

Pada Februari 1963 pemerintah meloloskan “Enterprise Nationalization Law” dan pada September 1963 melakukan nasionalisasi terhadap dua surat kabar. Kemudian pada tahun 1965, RC melarang publikasi semua surat kabar yang dikelola swasta. Di bawah “Enterprise Nationalization Law” semua industri utama berhasil dinasionalisasi pada 1 Juni 1963, dan industri-industri swasta dilarang untuk mendirikan pabrik-pabrik baru.⁴⁶

- b. Politik Myanmar di bawah State Law and Order Restoration Council (SLORC) dan State Peace and Development Council (SPDC) tahun 1988-2011

State Law and Order Restoration Council (SLORC) adalah pemerintahan militer Myanmar yang menggantikan *Revolutionary Council* sejak tahun 1988. Perubahan ini disebabkan oleh demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh para pelajar di Myanmar yang meminta Ne Win turun dari jabatannya. Tahun ini menandai berakhirnya kepemimpinan Jenderal Ne Win dan dimulainya kepemimpinan Saw Maung.

Politik dalam negeri pada masa ini didominasi oleh penekanan terhadap oposisi dan golongan di luar militer yang mengganggu keberadaan militer di kepemimpinan. Di bawah pemerintahan SLORC, terjadi pergantian nama negara dari “*Socialist Republic of the Union of Burma*” menjadi “*Union of Myanmar*”. SLORC mulai mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya.

⁴⁶ Holmes, Robert A. loc.cit. hlm. 190

Sepanjang tahun 1990-an militer memperkuat dominasi politik dan ekonomi mereka. Di tahun 1993, SLORC menunjuk sebuah *National Convention* baru untuk memformulasikan sebuah konstitusi yang dapat memberikan kontrol bagi militer untuk mengorganisasi ulang negara. Namun, sampai tahun 1996 konvensi tersebut gagal untuk menyelesaikan tugasnya.

Di tahun 1997, SLORC mengubah struktur organisasinya dan berganti nama menjadi *State Peace and Development Council* (SPDC). Meskipun telah berganti nama dan struktur, di bawah SPDC masih diberlakukan penekanan terhadap NLD dan juga dijalankan kontrol yang ketat.⁴⁷

SLORC dan SPDC diduga telah melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Ketika terjadi kerusuhan tahun 1988, angkatan bersenjata melakukan penembakan yang menewaskan sekitar 3,000 jiwa. Diikuti juga pada demonstrasi tahun 2007 yang terdiri dari aktifis, biarawan, dan masyarakat sipil, yang menewaskan sekitar 30 demonstran.⁴⁸

2. Politik Luar Negeri Myanmar

Sejak dari masa Pemerintahan U Nu, Myanmar menarik diri dari berbagai aliansi politik dan ekonomi

⁴⁷ Britannica. t.thn. *Myanmar since 1988*. Diakses April 7, 2018. <https://www.britannica.com/place/Myanmar/Myanmar-since-1988#ref509640>

⁴⁸ hrw.org. t.thn. *Burma: No Rights Reform 20 Years After Massacre*. Diakses April 7, 2018. <http://pantheon.hrw.org/legacy/english/docs/2008/08/07/burma19564.htm>

dengan negara mana pun, tetapi tetap berupaya untuk menjaga persahabatan dengan semua negara. Myanmar pun tidak terlibat dengan aliansi politik dan militer mana pun.

Di bawah pemerintahan rezim militer, Myanmar bergantung kepada netralisme yang cukup ketat. Seluruh kebijakan luar negerinya berupaya untuk melindungi perekonomian dan menyelamatkan Myanmar dari disintegrasi. Politik luar negeri yang juga dijalankan adalah *non-alignment* dan Myanmar masuk sebagai negara anggota Persemakmuran Inggris (*British Commonwealth*).⁴⁹

Kebijakan *non-alignment* dan *neutrality* ini tetap dilanjutkan setelah rezim militer berkuasa. Myanmar kemudian mengisolasi dan menarik diri dari hubungan internasional dan menolak semua pengaruh internasional dan terus menekankan *independence*-nya. Pada tahun 1961 Myanmar terlibat dalam pembentukan *Non-Aligned Movement* (NAM) atau Gerakan Non-Blok (GNB). Myanmar menjadi salah satu pendiri Gerakan Non-Blok pada NAM Summit di Beograd, Yugoslavia bersama 24 negara lain seperti, Afghanistan, Algeria, Yaman, Kamboja, Indonesia, Sudan, dan Tunisia.⁵⁰

Pada tahun 1979, Myanmar menyatakan diri keluar dari GNB ketika berlangsung KTT di Havana. Namun, Myanmar akhirnya kembali menjadi anggota GNB pada September 2002 saat KTT Gerakan Non-Blok berlangsung di Jakarta.

Sebagai negara yang masuk di kawasan Asia Tenggara, Myanmar pun masuk menjadi anggota

⁴⁹ Devi, Konsam Shakila. Op.cit

⁵⁰ Kemlu.go.id. t.thn. *Non-Aligned Movement*. Diakses April 9, 2018. https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerja_sama-multilateral/Pages/Non-Aligned-Movement.aspx

ASEAN. Akan tetapi, Myanmar baru resmi menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997. Sebelumnya Myanmar baru menjabat menjadi *observer* pada tahun 1994 dan keanggotaan Myanmar di ASEAN berlanjut sejak saat itu.

Untuk kebijakan ekonomi, Myanmar masih mengedepankan *self-reliance isolationist*. Myanmar menolak seluruh bantuan dari pihak asing dan memutus semua *economic assistance* dari luar Myanmar. Kebijakan luar negeri Myanmar dalam ekonomi mengalami sedikit perubahan pada tahun 1970-an. Pada tahun tersebut, Myanmar mulai melonggarkan kebijakannya yang menolak *economic assistance* dan memilih untuk menjadi *self-reliant*. Myanmar mulai menerima bantuan melalui Official Development Assistance (ODA) dari beberapa negara.

C. Dinamika Perekonomian Myanmar di Bawah Rezim Militer

1. Era Sosialis tahun 1962-1988

Di bawah pemerintahan Ne Win, beberapa pengamat yang dekat dengan Ne Win beranggapan bahwa kebijakan ekonomi junta militer pada satu dekade awal dijalankan untuk meningkatkan keadilan (*equity*) dibandingkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di samping meningkatkan keadilan, junta militer juga mengakhiri pengaruh dan eksploitasi dari perusahaan Barat dan India terhadap sumberdaya dari Myanmar.⁵¹

⁵¹ GlobalSecurity.org. t.thn. *Ne Win Military Rule - A Nationalized Economy*. Diakses April 18, 2018. <https://www.globalsecurity.org/military/world/myanmar/ne-win-2.htm>

Karena militer memegang kendali penuh terhadap seluruh elemen pemerintahan, tidak ada pihak lain yang dapat memengaruhi pembuatan kebijakan kecuali jika berada di bawah kontrol militer. Pembentukan kebijakan terlihat tidak terkoordinasi, dan terkadang saling bertolak belakang. Kepemimpinan militer hanya dapat diformulasikan dan diubah oleh anggota militer yang paling tinggi, walaupun memiliki informasi dan kemampuan yang sedikit tentang sebuah isu.⁵²

Myanmar menjadi negara yang menggunakan *inward-looking strategies* dengan mengedepankan *self-reliance* dari sumberdaya yang dimiliki. Pada saat yang sama, negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar mulai beralih dengan mengedepankan ekspor dan terlibat dalam perdagangan internasional.

Di masa pemerintahan era sosialis, pemerintah menginginkan semua kegiatan perekonomian berada di tangan masyarakat asli Myanmar. Oleh karena itu, junta militer mengeluarkan beberapa kebijakan perekonomian yang cenderung fokus kepada kapasitas domestiknya, antara lain:

a. Myanmar's Enterprise Nationalization Law

Pada 1963, pemerintah mengeluarkan Enterprise Nationalization Law yang berisi larangan bagi sektor swasta apa pun untuk beroperasi. Hingga akhir tahun 1960-an setelah peraturan ini diterapkan, sekitar 15,000 perusahaan swasta berhasil diambil alih oleh pemerintah. Perusahaan yang diambil alih terdiri dari sektor manufaktur berskala besar,

⁵² Steinberg, David I. 2005. *Burma/Myanmar: The Role of Military Rule in the Economy*. Burma Economic Watch hlm. 62

pertambangan, komunikasi, jasa, dan perbankan. Semua perusahaan tersebut dijalankan dan diawasi oleh komite khusus yang dibentuk oleh pemerintah.⁵³

Sebelum Enterprise Nationalization Law disahkan, pemerintah telah lebih dahulu melakukan nasionalisasi beberapa perusahaan. Upaya nasionalisasi ini muncul karena besarnya doktrin sosialis yang datang dari Brigadir Tin Pe dan U Ba Nyein. Sebelumnya, salah satu anggota militer dalam Revolutionary Council memberikan saran untuk menerapkan *mixed public-private sector economy*. Proses nasionalisasi dimulai dengan British-owned Imperial Chemical Industri di bulan Agustus dan Burma Oil Company pada Januari tahun 1963. Bank-bank baik domestik dan asing dinasionalisasi pada Februari 1963.

Di tahun 1963, pemerintah membentuk People's Store Corporation yang bertanggung jawab untuk mengatur distribusi dari barang domestik dan impor. Kegiatan perhotelan dan pengiriman barang (*shipping*) melibatkan the Defense Services Institute yang merupakan perusahaan di bawah kontrol militer.⁵⁴

b. Sistem Pajak dan Subsidi

Kontrol pemerintah terhadap kebijakan perpajakan dan subsidi tidak semata-mata untuk mengimplementasikan kebijakan sosialis, tetapi lebih kepada mengambil hasil dari rakyat sebagai alat untuk menjalankan pemerintahan. Kewajiban

⁵³ Cook, Paul. 1994. "Policy Reform, Privatization, and Private Sector Development in Myanmar." *South East Asia Research*, Vol. 2, No. 2 hlm. 118

⁵⁴ GlobalSecurity.org. Ne Win, Op.cit.

pajak yang paling berat jatuh bagi petani (*peasants*), yang juga diharuskan untuk menjual hasil taninya kepada pemerintah dengan nominal yang telah ditentukan. Ditambah lagi, para petani akan dibeli hasil panennya dengan harga rendah di bawah harga pasar. Pembelian hasil panen dari para petani ini digunakan untuk diberikan kepada anggota militer, lalu sebagai suplai untuk *civil services*, juga untuk bantuan bagi masyarakat dengan distribusi tersubsidi, yang terakhir untuk dijadikan komoditas ekspor.⁵⁵

Dalam melakukan pemerataan, sistem pajak Myanmar terkesan kurang transparan dan tidak akuntabel. Pajak rumah tangganya dikumpulkan oleh *local village councils* dan angkatan bersenjata. Masyarakat juga dipaksa untuk membayar *arbitrary fees* dan memberikan donasi untuk festival, pembangunan sekolah, pendaftaran dan penyediaan peralatan. Selain itu, dalam pengumpulan pajak, angkatan bersenjata dan *local military* sering terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (*human right abuses*).⁵⁶

c. Penerimaan Bantuan Asing

Di awal pemerintahan tahun 1962-1973 Myanmar masih menerapkan kebijakan isolasionis dari pihak luar dan masih berusaha menjadi *self-reliant country*. Namun, kebijakan tersebut berdampak pada merosotnya perekonomian

⁵⁵ Steinberg, David I. 2005. Loc.cit. hlm. 63

⁵⁶ Corben, Ron. 2010. *Myanmar's arbitrary tax system*. 2 September. Diakses April 4, 2018. <http://www.dw.com/en/myanmars-arbitrary-tax-system/a-5969019>

Myanmar. Akhirnya, pada tahun 1974, Myanmar mengubah peraturannya mengenai bantuan asing dari yang sebelumnya menolak kemudian mulai menerima bantuan dari pihak asing.

Awalnya, bantuan dan hadiah dari pihak luar sangat dicurigai dan sebagian besar ditolak oleh pemerintah. Junta militer kemudian mulai menyadari pentingnya kontak dan investasi dengan pihak asing untuk pembangunan. Salah satu bantuan asing yang diterima Myanmar pada saat itu adalah official development assistance (ODA) dalam bentuk pinjaman. Myanmar menerima bantuan pinjaman dari Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman Barat. Bantuan asing ini diperkirakan mencapai dua kali lipat dari jumlah hibah (*grants*) yang diperoleh Myanmar antara tahun 1974-1986.⁵⁷

d. Kebijakan Investasi Asing

Pemerintah militer mewajibkan seluruh investor asing dalam sektor apa pun melalui pemeriksaan oleh Myanmar Investment Commission yang dijalankan oleh militer. Komisi ini akan menentukan apakah investasi tertentu akan diterima atau tidak. Selain itu, jika investasi yang dilakukan melalui *joint ventures*, Komisi Investasi tersebut akan menentukan dengan organisasi atau perusahaan domestik mana investor asing akan bekerja sama. Organisasi atau perusahaan yang dapat diajak bekerja sama antara lain, *public sector industri*, kementerian, *military conglomerate*, atau sebuah *private concern*. Khusus untuk perusahaan di sektor produktif,

⁵⁷ Devi, Konsam Shakila. Loc.cit hlm. 48; Thein, Myat. Loc.cit hlm. 66

pemerintah mewajibkan penggunaan *state-owned land* dan pekerja yang dikontrol oleh pemerintah.

Pada periode 1962-65 investasi menyumbang sebesar 13,5% dari GDP Myanmar. Akan tetapi, pada periode 1986-1988 terjadi penurunan dan investasi menyumbang 12,5% dari GDP. Titik terendah terjadi pada tahun 1966-1969 dan 1974-1977 dengan angka 10,9% saja.⁵⁸

Kemerosotan perekonomian di Myanmar secara bertahap mulai terlihat. Akhirnya perekonomian Myanmar mulai diambil alih *black-market economies*.

Black-market economies berkembang karena adanya inefisiensi dalam pendistribusian barang untuk konsumen. Distribusi produk domestik melalui *black-market economies* disebabkan juga oleh adanya kelangkaan beras dan produk pangan penting yang tidak tersedia dan dijual secara ilegal dengan harga yang sangat tinggi.

Pada rentang waktu 1962-1988 perekonomian Myanmar mengalami stagnansi yang berlangsung cukup lama. Pertumbuhan GDP Myanmar mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 1962-1965 pertumbuhan GDP Myanmar mencapai angka 4,9%. Kemudian setelah itu terjadi penurunan pertumbuhan GDP yang cukup parah, hingga pada periode 1986-88 angka perumbuhannya menjadi -1,7%.

2. Era *Market-oriented* tahun 1988-2011

Kekacauan di bidang ekonomi yang terjadi di bawah pemerintahan sosialis akhirnya menyebabkan SLORC mengambil alih pemerintahan. Ketika

⁵⁸ Thein, Myat. Loc.cit hlm. 55

SLORC mulai menjalankan pemerintahan, terjadi reformasi ekonomi yang cukup signifikan. Myanmar yang semula menggunakan sistem sosialis mulai beralih menjadi *market-oriented*.

Di bawah pemerintahan SLORC dan SPDC, banyak kebijakan yang diubah dan sangat berbeda dengan kebijakan di masa Revolutionary Council. Mulai terlihat beberapa kelonggaran yang diberikan, tetapi masih tidak lepas dari kontrol militer di berbagai sektor. Tujuan dari reformasi ekonomi ini antara lain untuk mendorong investasi dan aktifitas usaha rumahan; membuka perekonomian untuk investasi asing dan perdagangan global; serta untuk mengadopsi *market-oriented system* untuk kegiatan perekonomian.

Reformasi ekonomi yang dilakukan SLORC membuat Myanmar mengalami peningkatan dalam beberapa indikator perekonomian. Partisipasi sektor swasta dalam perekonomian meningkat dari 68,6% pada tahun 1986-1987 menjadi 75,5% pada tahun 1996-1997 dan mencapai angka 76,3% pada tahun 1998-1999. Partisipasi sektor swasta difokuskan sebagian besar pada sektor perdagangan.

Peningkatan perekonomian juga terjadi di sektor produktif. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan antara lain: pertambangan; konstruksi; manufaktur; dan agrikultur.

Kebijakan-kebijakan yang direformasi oleh SLORC antara lain:

a. Myanmar's Foreign Investment Law 1988

SLORC mengeluarkan Foreign Investment Law yang mengurangi batasan terhadap partisipasi sektor swasta dalam perdagangan domestik dan internasional. Foreign Investment Law bertujuan untuk meningkatkan

technical know-how dan investasi di berbagai sektor kecuali yang sudah dibatasi oleh negara.

Kenaikan nilai investasi asing masih belum membuat Myanmar menjadi lebih baik. Pada pertengahan tahun 2000an, Myanmar masih menjadi negara yang dianggap berisiko tinggi sebagai negara tujuan investasi asing. Myanmar menduduki peringkat ketiga dari bawah sebagai negara dengan batasan-batasan dalam berbisnis yang cukup tinggi. Posisi ini berada di atas Iran dan Korea Utara. Selain itu, menyebarnya korupsi, tidak jelasnya jaminan hukum, pembuatan kebijakan yang memaksa, serta ketatnya izin untuk melakukan ekspor-impor menjadikan Myanmar sebagai negara yang tujuan investasi yang tidak menarik perhatian.⁵⁹

Sebelum investasi asing diizinkan masuk, Myanmar telah melakukan proses liberalisasi di bidang agrikultur pada tahun 1987. Pada bulan September 1987, pemerintah mengimplementasikan reformasi ekonomi untuk menghilangkan batasan-batasan perdagangan bagi sektor agrikultur. Para petani diperbolehkan untuk menjual kelebihan hasil panennya pada pasar terbuka. Selain itu, reformasi ini menyebabkan terjadinya desentralisasi dalam memutuskan masalah *cropping* dari yang sebelumnya diatur pemerintah, kemudian berada sepenuhnya di tangan para petani.⁶⁰

⁵⁹ Turnell, Sean. 2007. "Myanmar's economy in 2006." Dalam *Myanmar: The State, Community, and the Environment*, oleh Monrique Skidmore. ANU Press hlm. 111

⁶⁰ Rigg, Jonathan. 1997. *Southeast Asia: the human landscape of modernization and development*. London: Routledge

D. Transparansi, Tingkat Korupsi, dan Mismanagement di Myanmar

Kenaikan perekonomian yang terjadi di Myanmar tidak berlangsung lama. Hal ini disebabkan karena pemerintahan militer kembali melakukan *mismanagement* dan melakukan korupsi dari semua pendapatan yang masuk. Ditambah lagi, Myanmar menutup diri dan tidak melakukan transparansi dalam perekonomian. Semua berita yang disebarakan adalah berita yang disampaikan oleh pemerintah.

SPDC melakukan klaim bahwa pertumbuhan Myanmar semakin membaik dan meningkat. Rasio GDP Myanmar mencapai 10% per tahun selama hampir satu dekade. Pada tahun 2006, Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi (*National Planning and Economic Development*), Soe Tha, mengumumkan bahwa pertumbuhan Myanmar pada tahun 2005 telah mencapai 12,2%.

Tabel 2. 1 Klaim Pertumbuhan GDP Myanmar Tahun 1999-2005

Klaim Pertumbuhan GDP Tahun 1999-2005						
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
10,9	13,7	11,3	10,0	10,6	12,0	12,2

Sumber: Asian Development Bank, 2004. Asian Development Outlook 2004, Manila; Asian Development Bank, 2005. Asian Development Outlook 2005, Manila, dalam Sean Turnel, Myanmar's Economy in 2006, hlm. 110.

Klaim dari SPDC tersebut masih dipertanyakan dan diragukan kebenarannya. Myanmar pada saat itu tidak mempublikasikan data-data statistik. Data pertumbuhan yang tersedia dan dapat diakses adalah data yang

dikeluarkan bersamaan dengan pernyataan dari Kementerian. Economic Intelligence Unit mengeluarkan data estimasi pertumbuhan Myanmar yang sebenarnya. Data yang dikeluarkan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Myanmar tidak setinggi yang diklaim oleh Rezim militer.⁶¹

Tabel 2. 2 Estimasi Pertumbuhan GDP Myanmar Tahun 2001-2006 Menurut Economic Intelligence Unit

Estimasi Pertumbuhan Tahun 2001-2006					
2001	2002	2003	2004	2005	2006
5,3	5,3	-2,0	-2,7	3,7	1,8

Sumber: Economist Intelligence Unit, 2006. Burma (Myanmar): Country Report, May, Economist Intelligence Unit, London:5, dalam Sean Turnell, Myanmar's Economy in 2006 hlm. 111.

Corruption perceptions index tahun 2007 menunjukkan indikasi bahwa Myanmar menjadi negara yang tingkat korupsinya paling tinggi. Dari skala 0-10 dengan nol mengindikasikan tingginya tingkat korupsi, Myanmar berada di peringkat paling bawah dengan skor 1,4. Myanmar berada di level yang sama dengan negara Somalia.⁶²

Proses liberalisasi di Myanmar juga tidak sepenuhnya berjalan dengan benar. Militer melakukan eksploitasi untuk menambah kepemilikan bisnis mereka. Pemerintah

⁶¹ Turnell, Sean. Op.cit

⁶² Tran, Mark. 2007. *Burma is world's most corrupt country, says report.* 26 September. Diakses April 12, 2018. <https://www.theguardian.com/world/2007/sep/26/burma.mark.tran1>

mendirikan dua perusahaan besar, yakni, Union of Myanmar Economic Holdings Limited yang bergerak di bidang perbankan, perdagangan, pariwisata, dan batu berharga. Lalu yang kedua adalah Myanmar Economic Corporation yang bergerak di industri alat berat dan komoditas. Firma-firma yang berhubungan dengan militer menyerap sebagian besar investasi asing pada tahun 1990an. Junta militer kemudian menciptakan “*national entrepreneurs*” yang mendukung tujuan militer.⁶³

E. Kerja sama Myanmar dengan Tiongkok di Bawah Rezim Militer

Ketika Myanmar dijatuhkan embargo dan sanksi internasional oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat juga Uni Eropa karena dianggap melakukan pelanggaran pascapemilihan umum 1990, Myanmar mulai beralih mendekati Tiongkok untuk mencari dukungan militer, politik, dan ekonomi. Selama kurang lebih dua dekade setelah itu, tidak hanya Myanmar yang semakin bergantung kepada Tiongkok, keberadaan Myanmar bagi Tiongkok sebagai penyedia sumber daya alam, integrasi ekonomi regional, dan keamanan juga semakin meningkat.

Pada tahun 1988, total perdagangan antara Tiongkok dan Myanmar bernilai sekitar 9,5 juta dolar AS. Satu tahun kemudian, total perdagangan meningkat mencapai 76 juta dolar AS. Hingga pada 2009, Tiongkok menggantikan Thailand sebagai partner perdagangan Myanmar yang paling utama. Myanmar menjual kayu, batu permata, makanan laut, marmer, batu bara, nikel, dan sumber daya alam lainnya, sementara Tiongkok menjual

⁶³ Jones, Lee. 2014. “The Political Economy of Myanmar's Transition.” *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 44. No. 1 hlm. 149

produk jadi dengan harga murah, mulai dari makanan sampai barang elektronik.

Kerja sama investasi asing antara Myanmar dan Tiongkok juga mengalami peningkatan. Dari tahun 1988 sampai 2012, Myanmar menerima sekitar 41 juta dolar dari investasi Tiongkok. Sektor yang mendapatkan investasi asing cukup besar adalah perminyakan dan gas alam. Sekitar 69 perusahaan Tiongkok terlibat dalam proyek *hydropower* untuk pertambangan, perminyakan, dan gas alam di Myanmar.

Ketika dijatuhi embargo persenjataan, Tiongkok menjadi penyuplai senjata dengan sistem kredit dan harga yang 'bersahabat'. Sementara Myanmar memberikan sumber daya dan barang-barang lain sebagai gantinya. Selain itu, militer Tiongkok juga mulai melatih militer Myanmar, baik di wilayah Myanmar maupun Tiongkok. Di balik kerja sama dengan Tiongkok yang memberikan peningkatan bagi ekonomi Myanmar, rezim militer mulai menunjukkan kekhawatiran akan ketergantungan dengan Tiongkok. Kemudian, militer Myanmar mulai mencari persediaan senjata dan pelatihan militer dengan India, Rusia, Pakistan dan Korea Utara. ⁶⁴

⁶⁴ Zin, Min. 2012. "The Opening In Burma / The Democrats' Opportunity." *Journal of Democracy* hlm. 107-108